

BAB II

PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG

2.1 Profil Instansi



Gambar 2. 1 Logo Kementerian PKP

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III (BP3KP Jawa III) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Instansi ini berlokasi di Jl. Laksda Adisucipto No.165, Papringan, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Program magang dilaksanakan di Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (Klinik PKP), yaitu salah satu layanan BP3KP Jawa III yang bertujuan memberikan informasi terkait rumah layak huni, bantuan teknis kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan hunian yang layak. Klinik PKP juga menyediakan akses informasi daring, meliputi pelaksanaan konstruksi, pengawasan pembangunan, serta dokumen perencanaan perumahan melalui platform online yang tersedia.

Komunitas Poros Harapan dan Aksi (PONDASI) merupakan komunitas mahasiswa yang terbentuk atas dasar kepedulian terhadap isu perumahan dan permukiman layak. Komunitas ini didirikan oleh mahasiswa dengan dukungan dan arahan dari BP3KP Jawa III serta Habitat for Humanity.

Kedudukan PONDASI dalam lingkup Kementerian PKP adalah sebagai mitra strategis yang mendukung program edukasi, kampanye sosial dan penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perumahan dan permukiman yang layak huni. Meskipun bukan unit struktural resmi dari BP3KP Jawa III, PONDASI menjadi komunitas binaan yang berperan penting dalam mewujudkan visi perumahan layak huni, teratur dan berkelanjutan.

2.2 Sejarah Instansi

Kementerian yang menangani urusan perumahan di Indonesia pertama kali dibentuk pada 22 April 1978 dengan nama Kantor Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Lembaga ini mengalami beberapa perubahan struktur dan nomenklatur, termasuk menjadi Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah pada 1999, dan selanjutnya berubah menjadi Kementerian Perumahan Rakyat pada 2009 sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009(2011, 2011).

Setelah sempat dilebur ke dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2014, kementerian ini dibentuk kembali pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pelantikan Maruarar Sirait sebagai Menteri PKP dan Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri dilakukan pada 21 Oktober 2024

2.3 Latar Belakang

Pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di daerah, dibentuk Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai perpanjangan tangan Kementerian. BP3KP berperan sebagai unit pendukung pelaksanaan fungsi dan pengawasan penyelenggaraan PKP di daerah.

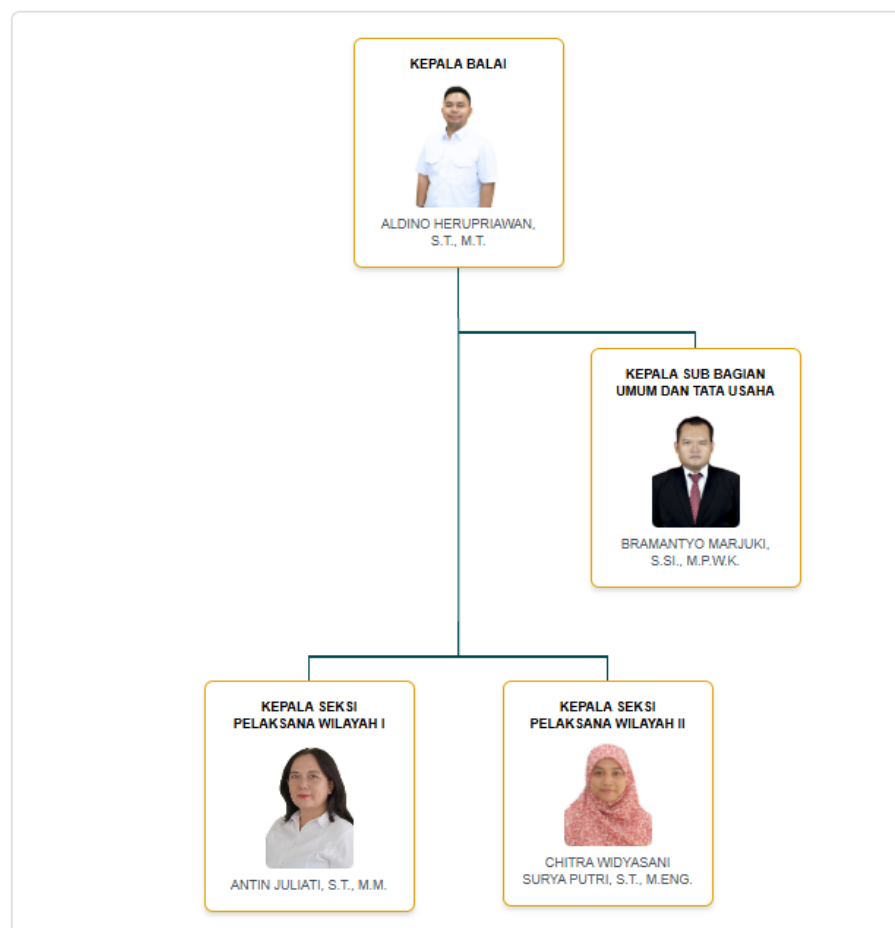
Saat ini, beberapa balai masih dalam proses pembentukan struktur organisasi dan penguatan sarana prasarana, termasuk manajemen aset dan kebutuhan SDM. Diperlukan pula penguatan kolaborasi dengan *stakeholders* daerah dan peningkatan pemahaman melalui pertemuan rutin. BP3KP diharapkan menjadi penyatu yang mampu menjembatani berbagai pihak dalam mewujudkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas (BP3KP, 2025)

2.4 Struktur Organisasi



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA III

PEJABAT STRUKTURAL



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BP3KP Jawa III

2.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi

Balai pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III, struktur organisasi berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang perumahan dan Kawasan permukiman. Masing-masing jabatan memiliki peran strategis yang saling berkaitan guna mencapai visi dan misi Lembaga secara keseluruhan (Undang-undang, 2019) :

1. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional di lingkungan balai.
 - b. Menetapkan kebijakan strategis dan arah pelaksanaan program perumahan dan Kawasan permukiman.
 - c. Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja balai secara keseluruhan.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh seluruh unit di bawahnya.
2. Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
 - a. Mengelola administrasi umum, kepegawaian, dan tata usaha di lingkungan balai.
 - b. Bertanggung jawab atas pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, arsip, serta penjadwalan kegiatan kantor.
 - c. Mengatur kebutuhan perlengkapan kerja pegawai.
 - d. Melaksanakan pengelolaan anggaran dan keuangan secara administrasi sesuai regulasi
3. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I
 - a. Melaksanakan program dan kegiatan penyediaan perumahan serta pengembangan Kawasan permukiman di wilayah kerja I.
 - b. Menyusun rencana kegiatan lapangan dan koordinasi teknis dengan *stakeholder*.

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek Pembangunan yang sedang berjalan di wilayah I
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan dan capaian kegiatan wilayah I secara berkala kepada Kepala Balai.
4. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II
- a. Melaksanakan kegiatan Pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah kerja II sesuai rencana kerja tahunan.
 - b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, pengawasan lapangan, dan penyelesaian proyek wilayah II.
 - c. Menyusun laporan perkembangan kegiatan fisik dan tidak fisik di lapangan.
 - d. Menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah daerah, mitra kerja, dan Masyarakat setempat.